

KINERJA DINAS PENDIDIKAN DALAM MEMBERANTAS BUTA AKSARA DI KECAMATAN SENGAH TEMILA KABUPATEN LANDAK

Oleh:
SANTO AGLASIVIESO
NIM. E42010053

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
E-mail : santoaglas@gmail.com

ABSTRAK

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk menganalisis kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Landak dalam memberantas buta aksara di Kecamatan Sengah Temila. Penulisan skripsi ini didasarkan atas permasalahan kinerja Dinas Pendidikan dalam menuntaskan buta aksara di kecamatan Sengah Temila yang belum maksimal. Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif dengan subjek penelitian Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Landak, Kepala Bidang Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Landak, Kasi PLS dan PAUD Dinas Pendidikan Kabupaten Landak, Kepala Desa Tonang, dan masyarakat Sengah Temila yang menyandang buta aksara. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah, kurang optimalnya kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Landak dalam memberantas buta aksara di Kecamatan Sengah temila karena secara produktivitas Pelayanan pendidikan keaksaraan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Landak untuk memberantas buta aksara di kecamatan Sengah Temila belum efektif dan efisien, dan secara responsivitas Secara keseluruhan kemampuan Dinas Pendidikan Kabupaten Landak untuk mengenali kebutuhan masyarakat penyandang buta aksara masih minim, Kemampuan Dinas Pendidikan untuk mengembangkan program PKBM Bukit Sehaq di kecamatan Sengah Temila belum sesuai dengan prinsip responsivitas. Saran dalam penelitian ini antara lain Dinas Pendidikan kabupaten Landak harus melengkapi fasilitas program, penetapan jadwal pembelajaran harus dibuat dengan jelas, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Landak harus menambah anggaran.

Kata Kunci : Kinerja Dinas Pendidikan kabupaten landak, Produktifitas kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Landak, Responsivitas kerja Dinas pendidikan Kabupaten Landak.

ABSTRACT

Santo Aglasivieso : Office of Education Performance In Eradicate Illiteracy in Sub Sengah Temila Porcupine District . **Thesis . Pontianak : Faculty of Social Science Program Administration Tanjungpura University Cooperation with Government of West Kalimantan Province .**

Thesis writing is intended to analyze the performance of Porcupine District Education Office in eradicating illiteracy in the District Sengah Temila . This thesis is based on the performance of the Department of Education issues in the illiterate in the district Sengah Temila is not maximized so that the illiteracy rate in Sub Sengah Temila still high. This study used a qualitative research model with research subjects Porcupine District Head of Education , Head of Non-Formal Education Porcupine District Education Office , Head of PLS and early childhood Porcupine District Education Office , Village Head Tonang Sengah Temila. Blind study this is , less optimal performance Porcupine District Education Office in eradicating illiteracy in the district because productivity Sengah Temila literacy education services organized by the Porcupine District Education Office to eradicate illiteracy in the district Sengah Temila not effective and efficient .and responsiveness overall Porcupine District Education Office 's ability to recognize the needs of the illiterate people still minimal , Suggestions in this study include Porcupine District Education Office must complete the program facilities , efforts to empower existing regional potential to be maximized , and the Porcupine District Education Department should increase the budget.

Keywords : Performance hedgehog District Education Office , District Education Office Productivity Hedgehog work , work Responsiveness Porcupine District Education Office .



A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

UUD 1945 mengamanatkan kepada semua warga negara untuk memberantas buta aksara sesuai dengan tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Juga terdapat pada pasal 31 ayat 1 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Undang-undang yang mengatur sistem pendidikan nasional yaitu undang-undang No.20 Tahun 2003 atau yang dikenal dengan UU SISDIKNAS, undang-undang ini merupakan perubahan dari undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kenyataannya, di kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak jumlah penduduk yang menyandang buta aksara masih tinggi. Bahkan dari 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Landak, kecamatan Sengah Temila berada di urutan pertama dengan penyandang buta aksara terbanyak. Berdasarkan data diatas dapat diketahui dari 56.456 jiwa penduduk kecamatan Sengah Temila, penduduk yang menyandang buta aksara berjumlah 13.504 jiwa atau 25 % dari jumlah penduduk yang ada. Memberantas buta aksara adalah bagian dari tugas dan fungsi Dinas Pendidikan. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Landak nomor 16 tahun 2008 Tentang Sistem Pendidikan di Daerah telah dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan pendidikan di daerah. Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan nasional melalui jalur pendidikan non formal. Dasar dari pelaksanaan PKBM ini terdapat dalam Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan dan penyelenggaraan program pendidikan nonformal. Kuatnya posisi hukum PKBM diimplementasikan dalam aturan secara khusus yaitu dalam PP nomor 17 tahun 2010 pasal 105, maka sudah seharusnya pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan perhatian lebih serius. Dinas Pendidikan Kabupaten Landak belum maksimal dalam menjalankan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) khususnya program keaksaraan di kecamatan Sengah Temila. Sesuai dengan pengamatan awal dan data yang diperoleh penulis (10 Februari 2014), kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Landak khususnya pada bidang pendidikan

nonformal dalam memaksimalkan PKBM belum optimal sehingga buta aksara di kecamatan Sengah Temila belum tuntas sepenuhnya. Dari segi produktivitas, bahwa pelayanan pendidikan keaksaraan di kecamatan Sengah Temila belum efektif, masih ada beberapa kendala yang menyebabkan pelayanan pendidikan keaksaraan di kecamatan Sengah Temila belum efektif misalnya kurangnya fasilitas berupa gedung, alat pembelajaran, maupun tenaga pendidik yang terbatas. Dari segi responsivitas, bahwa kemampuan Dinas Pendidikan untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan dan mengembangkan PKBM Bukit Sehaq masih kurang, hal ini dibuktikan bahwa tutor yang ditunjuk untuk mendidik para peserta didik tidak disiplin dan terkadang selalu berhalangan dalam menjalankan tugas. Selain itu anggaran untuk mengembangkan PKBM Bukit Sehaq masih minim. Berdasarkan latar belakang di atas penulis menemukan adanya permasalahan pada kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Landak. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengajukan judul penelitian **"Kinerja Dinas Pendidikan Dalam Memberantas Buta Aksara di Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak"**.

2. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas mengingat banyaknya Tupoksi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Landak, ruang lingkup lokasi dibatasi pada Bidang Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan kabupaten landak, karena bidang tersebut yang menangani buta aksara yaitu melalui Pendidikan Luar Sekolah yang dijalankan di Kecamatan Sengah Temila.

3. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis menyusun rumusan permasalahan Bagaimana Kinerja Dinas Pendidikan dalam Memberantas Buta Aksara di kecamatan Sengah Temila kabupaten Landak?

4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang dipaparkan, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Dinas Pendidikan dalam memberantas buta aksara di Kecamatan Sengah Temila Kabupaten landak.

5. Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi keilmuan dalam memahami dan menjelaskan tentang Kinerja Dinas Pendidikan bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura khususnya pada mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan dalam upaya memberantas buta aksara.

b) Manfaat Praktis

Bagi penulis, sebagai wahana untuk melatih berfikir secara ilmiah dan sarana belajar untuk memahami permasalahan yang menjadi topik kejadian. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi instansi yang terkait yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Landak. Bagi pihak akademisi, sebagai wacana untuk dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti yang ingin mengkaji permasalahan kinerja organisasi secara mendalam.

B. KAJIAN TEORI DAN METODOLOGI

1. Kajian teori

a. Teori Kinerja

Pasolong (2007:175) menyatakan konsep kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah hasil kerja perorangan dalam suatu organisasi. Sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi. Sebagaimana yang ditulis Prawirosentono (dalam Pasolong 2007:176), mengatakan kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh pegawai atau kelompok pegawai dalam organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing, dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai moral. Widodo (2005:78) mengatakan kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggungjawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan. Berman (dalam Keban 2008:87) yang mengatakan bahwa kinerja adalah pemanfaatan sumberdaya secara efisien dan efektif untuk mencapai hasil. Wibawa (2009:177) mengemukakan bahwa kinerja organisasi adalah sebagai efektivitas organisasi secara menyeluruh untuk kebutuhan yang telah ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan melalui usaha-usaha sistemik dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus menerus untuk

mencapai kebutuhan secara efektif. Chaizi (2004) mengemukakan bahwa kinerja organisasi adalah sebagai efektivitas organisasi secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan melalui usaha-usaha yang sistemik dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus menerus mencapai kebutuhannya secara efektif. Pasolong (2007:177) kemudian menyimpulkan bahwa kinerja mempunyai beberapa elemen yaitu:

1. Hasil kerja dicapai secara individual atau institusi, yang berarti kinerja tersebut adalah hasil akhir yang diperoleh secara sendiri-sendiri atau kelompok
2. Dalam melaksanakan tugas, orang atau lembaga diberikan wewenang dan tanggungjawab, yang berarti orang atau lembaga diberikan hak dan kekuasaan untuk ditindaklanjuti, sehingga pekerjaannya dapat dilakukan dengan baik
3. Pekerjaan haruslah dilakukan secara legal, yang berarti dalam melaksanakan tugas individu atau lembaga tentu saja harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan
4. Pekerjaan tidaklah bertentangan dengan moral atau etika, artinya selain mengikuti aturan yang telah ditetapkan, tentu saja pekerjaan tersebut haruslah sesuai moral dan etika yang berlaku umum.

Dari beberapa pengertian kinerja yang disampaikan oleh para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh individu sesuai dengan peran atau tugasnya dalam periode tertentu, yang dihubungkan dengan ukuran nilai atau standar tertentu dari organisasi tempat individu tersebut bekerja.

Dwiyanto (dalam Pasolong 2007:50-51) menjelaskan beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik, yaitu:

1. Produktivitas, yaitu tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga mengukur efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai ratio antara input dengan output.
2. Kualitas Layanan, yaitu : cenderung menjadi penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul

karena ketidakpuasan publik terhadap kualitas.

3. Responsivitas, yaitu kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan aspirasi masyarakat.
4. Responsibilitas, yaitu menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan birokrasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dengan kebijakan birokrasi, baik yang eksplisit maupun implisit.
5. Akuntabilitas, yaitu menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi publik tunduk pada para pejabat publik yang dipilih oleh rakyat.

Dari beberapa indikator pengukuran kinerja organisasi diatas, penulis lebih memilih menggunakan pada indikator responsivitas dan responsibilitas. Penulis memilih kedua indikator kinerja tersebut karena dianggap sesuai, tepat dan mampu untuk mengukur kinerja Dinas Pendidikan dalam memberantas buta aksara di Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak, mulai melihat dari pembentukan PKBM hingga pelaksanaannya dan sampai pengembangan program. Penulis tidak memilih indikator kualitas layanan, responsibilitas, dan akuntabilitas karena ketiga indikator tersebut sudah terwakili oleh indikator produktivitas dan responsivitas.

Tangkilisan (2005:177) menyatakan beberapa prinsip yang dilihat dari indikator produktivitas dan responsivitas, prinsip dari responsivitas antara lain sebagai berikut: Akses yang diberikan organisasi publik terhadap pengguna jasa, berbagai tindakan aparat birokrat untuk memberikan kepuasan pelayanan, komunikasi antara pemberi layanan dan penerima layanan. Sedangkan beberapa prinsip yang dilihat dari indikator produktivitas adalah: Bagaimana efektivitas layanan yang diberikan oleh organisasi terhadap masyarakat, bagaimana organisasi mengolah dan memberdayakan sumber-sumber potensi daerah yang ada secara ekonomis dan efisien, bagaimana efektivitas hasil dapat bermanfaat memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat.

b. Konsep Efektif dan Efisien

Steers (1985:50) mengemukakan bahwa: "Efektivitas adalah adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan

sasaran suatu organisasi." Dari pendapat Steers mengenai efektivitas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Pengertian efisiensi menurut Supriyono (1997:35) yaitu jika suatu unit dapat bekerja dengan baik, sehingga dapat mencapai hasil atau tujuan yang diharapkan. Efisiensi adalah tingkat kinerja yang menggambarkan suatu proses yang menggunakan sedikit input untuk menciptakan output yang lebih besar. Dalam hal ini efisiensi merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output).

c. Pelayanan Publik

Pelayanan publik menurut Sinambela (2006:5) adalah "sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada produk secara fisik". Pengertian tersebut menyatakan bahwa pelayanan publik diselenggarakan oleh Pemerintah yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat demi mencapai kepuasan bagi masyarakat melalui layanan barang maupun jasa. Kurniawan (2005:6) mengatakan bahwa "pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan". Pengertian di atas menyatakan bahwa pihak penyelenggara pelayanan harus tetap pada pelaksanaan standar pelayanan yang menjadi aturan baku dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Menurut Sinambela (2006:7) ada beberapa indikator dalam pelayanan publik yaitu:

1. *Realibity*, yaitu pemberian pelayanan yang tepat dan benar
2. *Tangibles*, penyediaan yang memadai sumber daya manusia dan sumber daya lainnya
3. *Responsivenees*, yaitu suatu kemauan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dengan penyampaian yang jelas juga kemampuan untuk menanggapi keluhan
4. *Assurance*, yaitu ditandai dengan tingkat perhatian terhadap etika dan moral dalam memberikan pelayanan dan empati

5. *Emphaty*, yaitu ditandai dengan tingkat kemauan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen.

d. Buta Aksara

Fakhrurozi (2009) menyatakan bahwa buta aksara adalah ketidakmampuan membaca dan menulis baik bahasa Indonesia maupun bahasa lainnya. Buta aksara juga dapat diartikan sebagai ketidakmampuan untuk menggunakan bahasa dan menggunakannya untuk mengerti sebuah bacaan, mendengarkan perkataan, mengungkapkan dalam bentuk tulisan, dan berbicara. Faktor-faktor yang membuat seseorang menjadi buta aksara menurut Fakhrurozi (2009:25), diantaranya:

Penyebab buta aksara yang terjadi di Indonesia adalah karena mereka tidak pernah bersekolah sama sekali, kemiskinan adalah faktor utama yang membuat seseorang menjadi buta aksara karena untuk makan sehari-hari juga, jauh dengan layanan pendidikan. Orang tua menganggap bahwa sekolah itu tidak penting.

2. Metode Penelitian

Penelitian mengenai Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Landak. Kondisi Kantor Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Landak dilakukan oleh Grigchella Yolanda Putri pada tahun 2013. Skripsi ini dibuat dalam rangka menyelesaikan pendidikan di Universitas Tanjungpura Pontianak. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa BKPP Kabupaten Landak masih dalam keadaan kekurangan tenaga kerja yang terdidik dan terampil pada bidang pemerintahan sehingga kantor BKPP mengalami kendala yang berarti dalam penyelesaian, penyusunan, penempatan, kenaikan pangkat dan lain-lain ini merupakan titik lemah pencapaian tujuan program pemerintah berkenaan dengan pelayanan birokrasi karena terkendala dengan masalah pendidikan dan keterampilan tenaga kerja. Penelitian mengenai Kinerja Operator Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya dilakukan oleh Dendy Partono pada tahun 2013. Skripsi ini dibuat dalam rangka menyelesaikan pendidikan di Universitas Tanjungpura Pontianak. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa buruknya pelayanan publik selama ini menjadi salah satu variabel penting yang mendorong munculnya krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Krisis kepercayaan masyarakat teraktualisasi dalam bentuk protes dan demonstrasi yang cenderung tidak sehat menunjukkan kefrustasian publik terhadap pemerintah.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Produktivitas

Menurut Dwiyanto (dalam Pasolong 2007:50-51) Produktivitas, yaitu tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga mengukur efektifitas pelayanan. Pengertian efisiensi menurut Supriyono (1997:35) yaitu jika suatu unit dapat bekerja dengan baik, sehingga dapat mencapai hasil atau tujuan yang diharapkan. Efisiensi adalah tingkat kinerja yang menggambarkan suatu proses yang menggunakan sedikit input untuk menciptakan output yang lebih besar. Dalam upaya menurunkan tingkat buta aksara di Kecamatan Sengah Temila, Dinas Pendidikan Kabupaten Landak sudah menyelenggarakan program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Dengan adanya program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) berarti sudah ada input yang dibuat untuk menghasilkan output, keluaran yang tentunya ingin dicapai dengan adanya program PKBM. Diketahui bahwa program PKBM Bukit Sehaq belum efisien dalam menurunkan angka buta aksara di kecamatan Sengah Temila. Dinas Pendidikan hanya mengandalkan satu program saja untuk memberantas buta aksara di kecamatan Sengah Temila. Dengan adanya program PKBM saja belum mampu menuntaskan buta aksara di kecamatan Sengah Temila yang masih tinggi. Pengertian efektifitas menurut Steers (1985:50) adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasaran suatu organisasi. Masyarakat yang masih menyandang buta aksara memang sudah menerima layanan pendidikan keaksaraan, tetapi dalam menerima layanan pendidikan keaksaraan di kecamatan Sengah Temila para peserta didik kurang mendapatkan fasilitas berupa sarana dan prasarana. Peserta didik melakukan pembelajaran di rumah-rumah masing-masing, kemudian hanya mendapatkan satu kali bantuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Landak yaitu berupa alat tulis seperti buku tulis, pulpen dan pensil, setelah itu para peserta didik membeli perlengkapan sendiri. Fasilitas berupa gedung tempat pembelajaran pendidikan keaksaraan di kecamatan Sengah Temila belum dibuat secara khusus. Artinya dalam proses pembelajaran keaksaraan masih menggunakan rumah-rumah penduduk dan menumpang pada rumah sekolah setempat. Proses pembelajaran keaksaraan tentu tidak akan efektif apabila tempat/gedung tempat proses belajar berlangsung tidak tetap. Kemudian jadwal pembelajaran yang tidak

tetap menyebabkan kurang efektifnya program PKBM untuk menurunkan angka buta aksara. Produktivitas kerja dari Dinas Pendidikan dalam memberikan pelayanan pendidikan keaksaraan menurut Sinambela (2006:7) harus didukung oleh dimensi *tangible* (berwujud) yaitu penyediaan yang memadai sumber daya manusia dan sumber daya lainnya terdiri atas bangunan sebagai tempat kegiatan belajar, kemudian kelengkapan di dalamnya seperti kursi, meja, rak buku, lemari, papan tulis, tong sampah, papan pengumuman dan lain sebagainya. Fasilitas pada gedung PKBM Bukit Sehaq yaitu berupa papan informasi kondisinya sudah rusak dan tidak layak untuk digunakan lagi, papan triplek sudah terkelupas, sudah seharusnya fasilitas papan informasi ini diganti dengan yang baru. Kondisi didalam gedung PKBM Bukit Sehaq tampak tidak terurus lagi, buku-buku yang ada pada rak tampak berserakan bahkan sudah banyak yang hilang. Kursi dan meja ada yang sudah rusak sehingga tidak bisa digunakan lagi. Kondisi dari fasilitas fisik sangat berpengaruh terhadap kenyamanan dalam proses pelayanan. Agar pemberantasan buta aksara bisa efektif tentunya tidak terlepas dari bagaimana cara Dinas Pendidikan Kabupaten Landak memberdayakan sumber-sumber potensi daerah yang ada. Keterlibatan beberapa pihak tentunya akan membantu Dinas Pendidikan Kabupaten Landak untuk lebih cepat memberantas buta aksara di kecamatan Sengah Temila. Keterlibatan Kepala Desa dalam menangani buta aksara hanya sebatas mendata penduduk desa masing-masing yang masih menyandang buta aksara. Kepala Desa tentunya lebih mengetahui kondisi masyarakatnya. Dinas Pendidikan Kabupaten Landak sudah ada usaha untuk memberdayakan sumber-sumber potensi daerah yang ada. Tenaga pendidik/tutor untuk mengajar para peserta didik keaksaraan melibatkan beberapa guru setempat dan masyarakat yang telah berpendidikan. Dinas Pendidikan Kabupaten Landak hanya memberikan gaji sebesar Rp 300.000,00/bulan untuk para tutor, hal ini juga memberikan pengaruh terhadap motivasi dan semangat tutor untuk terus mengajar para peserta didik. Anggaran yang digunakan untuk program PKBM Bukit Sehaq di ambil dari APBD kabupaten Landak, dengan anggaran yang ada Dinas Pendidikan sudah berupaya memaksimalkan anggaran untuk menunjang program PKBM Bukit Sehaq, walaupun belum cukup untuk memenuhi kebutuhan program. Efektifitas hasil dari program PKBM Bukit Sehaq tentunya menjadi tujuan yang

ingin dicapai. Output dari program PKBM yang diharapkan yaitu tuntasnya masalah buta aksara di kecamatan Sengah Temila. Efektifitas PKBM adalah suatu keberhasilan dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dikehendaki dengan memanfaatkan sumber daya organisasi. Proses pembelajaran pendidikan keaksaraan berlangsung selama 6 bulan yaitu mulai dari bulan Juni sampai bulan desember. Jika sudah menyelesaikan pendidikan keaksaraan maka peserta didik akan mendapatkan Surat Keterangan Melek Aksara (SUKMA) dari Dinas Pendidikan kabupaten Landak. Output atau hasil dari program PKBM tentunya benar-benar bisa memberikan manfaat bagi masyarakat.

2. Responsivitas

Responsivitas menurut Dwiyanto (dalam Pasolong 2007:50-51) yaitu kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan aspirasi masyarakat. Tangkilisan (2005:177) menyatakan beberapa prinsip yang dilihat dari indikator responsivitas yaitu meliputi akses, tindakan aparat birokrat memberikan kepuasan pelayanan, dan komunikasi. Akses berkaitan dengan kesediaan aparatur (para petugas) untuk memberikan pelayanan kepada pengguna jasa (masyarakat) secara merata tanpa adanya sikap diskriminatif, karena jika kondisi ini berlangsung, maka akan ada kesenjangan dalam pemberian pelayanan, sehingga pemerataan pelayanan tidak akan tercapai dan berdampak rendahnya kualitas layanan. Tutor yang ditugaskan untuk mengajari para peserta didik tampak tidak disiplin karena terkadang berhalangan untuk melaksanakan tugas. Pemilihan tutor yang berasal dari berbagai profesi menjadi kendala tersendiri dalam melaksanakan tugas karena mereka memiliki kesibukan lain yang berbeda-beda. Sumber daya manusia yang profesional dan kompeten merupakan salah satu faktor penentu birokrasi dalam mencapai tataran kinerja secara optimal. Komunikasi berkaitan dengan kelancaran hubungan verbal maupun fisik antara aparatur (petugas) dan pengguna jasa dalam proses pemberian pelayanan. Kelancaran hubungan ini secara otomatis memberikan kesempatan bagi kecepatan pemberian layanan secara berkualitas, sesuai dengan harapan pengguna

jasa maupun misi dari birokrasi publik. Responsivitas Dinas Pendidikan Kabupaten Landak dalam memberikan pelayanan pendidikan keaksaraan di kecamatan Sengah Temila sepertinya belum optimal. Peneliti melihat kemampuan Dinas Pendidikan Kabupaten Landak untuk mengembangkan program PKBM Bukit Sehaq belum sesuai dengan prinsip responsivitas. Berdasarkan hasil observasi dilapangan peneliti melihat bahwa dalam mengembangkan program PKBM di kecamatan sengah Temila masih mendapat beberapa kendala seperti anggaran, karena Dinas Pendidikan menugaskan ketua PKBM Bukit Sehaq sebagai penilik untuk mendata masyarakat kecamatan Sengah Temila yang menyandang buta aksara, dalam proses pendataan ini tentunya para tenaga sukarela membutuhkan dana untuk keperluan pendataan, dan dana tersebut harus dianggarkan terlebih dahulu dari APBD. kemampuan Dinas Pendidikan Kabupaten Landak untuk memenuhi kebutuhan program PKBM Bukit Sehaq belum optimal. Fasilitas yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Landak belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan peserta didik untuk menunjang dalam pembelajaran pendidikan keaksaraan, padahal menurut Sinambela (2006:7) bahwa indikator pelayanan publik salah satunya adalah adanya *emphaty* yaitu kemauan organisasi untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen. Dinas Pendidikan Kabupaten landak belum sepenuhnya mendukung masyarakat untuk pemberantasan buta aksara di kecamatan Sengah Temila, upaya dari Dinas Pendidikan sendiri sebenarnya sudah ada tetapi belum cukup untuk mendukung masyarakat dalam pembelajaran, masyarakat berfikir bahwa mereka hanya tau sebagai penerima layanan dari pemerintah. Pelayanan Publik menjadi semakin penting karena akan berhubungan langsung dengan masyarakat. pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan kabupaten Landak sepertinya hanya mau menyelenggarakan program tetapi kurang memenuhi apa yang menjadi keperluan masyarakat selaku penerima layanan, karena dalam hal ini program yang dijalankan yaitu pendidikan keaksaraan tentunya membutuhkan banyak dukungan baik sumber daya maupun materi. Dalam proses pembelajaran keaksaraan tentunya masyarakat ingin merasa nyaman dan mendapat layanan pendidikan yang baik, dengan begitu masyarakat akan merasa terdorong untuk lebih giat lagi belajar dan output yang

diharapkan tentunya masyarakat Sengah temila terbebas dari buta aksara. Responsivitas berkaitan dengan kecepatan tanggapan yang dilakukan oleh aparatur atau pegawai terhadap kebutuhan pengguna jasa, yang dalam hal ini adalah masyarakat yang membutuhkan pelayanan sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Responsivitas pelayanan publik dijabarkan menjadi beberapa hal menyangkut dengan kinerja pegawai yaitu terdapat tidaknya keluhan dari pengguna jasa. Sikap aparat birokrasi dalam merespon keluhan dari pengguna jasa menunjukkan tanggapan keluhan dari pengguna jasa sebagai referensi dari perbaikan penyelenggaraan pelayanan pada masa mendatang, berbagai tindakan aparat birokrasi untuk memberikan kepuasan pelayanan kepada pengguna jasa, penempatan pengguna jasa oleh aparat birokrasi dalam sistem pelayanan yang berlaku. Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Landak dalam menuntaskan buta aksara di kecamatan Sengah Temila bisa dinilai baik buruknya dengan melihat hasil akhir yang diperoleh dari program PKBM yang sudah berjalan. Dengan melihat data yang ada dari BPS kabupaten Landak tahun 2013 bisa diketahui jumlah penyandang buta aksara yang sudah dituntaskan berjumlah 130 penyandang dari 13.504 jiwa. Artinya hasil yang dicapai belum menunjukkan adanya keberhasilan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Landak untuk memberantas buta aksara di kecamatan Sengah Temila, masih ada sekitar 13.473 penyandang yang buta aksara yang harus dituntaskan.

D. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dilapangan peneliti menarik kesimpulan bahwa kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Landak dalam memberantas buta aksara di kecamatan Sengah Temila belum efektif dan efisien, hal tersebut dilihat berdasarkan indikator-indikator pengukuran kinerja birokrasi sebagai berikut:

1. Produktivitas

Pelayanan pendidikan keaksaraan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Landak untuk memberantas buta aksara di kecamatan Sengah Temila belum efektif dan efisien. Program PKBM Bukit Sehaq yang berjalan belum didukung sepenuhnya oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Landak. Secara fisik kondisi kantor tidak memenuhi standar kenyamanan dalam pelayanan dimana kondisi peralatan dan

perlengkapan kantor yang kurang terpelihara. Kurangnya fasilitas pembelajaran seperti buku-buku untuk pendidikan keaksaraan juga menjadi faktor belum efektifnya pemberantasan buta aksara di kecamatan Sengah Temila. Proses pembelajaran keaksaraan masih dilaksanakan pada rumah-rumah penduduk, padahal mengingat setiap rumah penduduk jaraknya berjauhan satu sama lain sementara itu tenaga pendidik yang terbatas menyebabkan jadwal pembelajaran menjadi tidak tetap dan berubah-ubah. Kemampuan organisasi memberdayakan sumber-sumber potensi daerah yang ada secara ekonomis dan efisien sudah baik, namun kedisiplinan tutor sebagai tenaga pendidik juga faktor yang berpengaruh dalam keberhasilan pemberantasan buta aksara. Tutor yang ada terkadang berhalangan untuk mengajar peserta didik karena mereka diambil dari tenaga sukarela yang sudah mempunyai profesi khusus selain mengajar warga belajar, sehingga sibuk dengan urusan masing-masing. Efektifitas hasil dari program PKBM yang dibuat sudah cukup baik, walaupun buta aksara di kecamatan Sengah Temila yang sudah berhasil dituntaskan baru berjumlah 130 jiwa dari jumlah keseluruhan penyandang yaitu 13.504 jiwa. Para peserta didik yang sudah menyelesaikan pendidikan keaksaraan sudah dihargai dengan cara memberi Surat Keterangan Melek Aksara (SUKMA).

2. Responsivitas

Secara keseluruhan kemampuan Dinas Pendidikan Kabupaten Landak untuk mengenali kebutuhan masyarakat penyandang buta aksara masih minim, dalam hal ini kebutuhan yang diperlukan adalah penyediaan sarana dan prasarana guna menunjang proses pembelajaran pendidikan keaksaraan seperti buku-buku, pulpen, pensil, dan alat tulis lainnya. Masyarakat masih mendapat keluhan kurangnya bantuan dari pemerintah, sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penunjang terciptanya pelayanan publik yang baik. Salah satu misi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Landak sendiri adalah terwujudnya pendidikan luar sekolah secara adil dan merata, walaupun misi sudah ditetapkan tetapi dalam kenyataannya kemampuan Dinas pendidikan dalam menjalankan misi dan

tujuannya tidak sepenuhnya berjalan seperti yang diharapkan, masih banyak kendala yang dihadapi mulai dari anggaran, hingga keterbatasan sumber daya yang ada, hal ini yang menyebabkan buta aksara di kecamatan Sengah Temila belum tuntas sepenuhnya. Kemampuan Dinas Pendidikan untuk mengembangkan program PKBM Bukit Sehaq di kecamatan Sengah Temila belum sesuai dengan prinsip responsivitas. Pelayanan pendidikan keaksaraan yang diselenggarakan oleh Dinas pendidikan Kabupaten Landak belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat terutama para peserta didik, karena tutor yang ditugaskan untuk mengajar para peserta didik kadang-kadang tidak disiplin. Kemampuan Dinas Pendidikan Kabupaten Landak untuk mengembangkan program PKBM Bukit Sehaq masih terkendala dari anggaran yang kurang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Referensi

- Dharma, Surya. 2005. *Manajemen Kinerja – Falsafah Teori dan Penerapannya*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Dwiyanto, Agus dkk. 2006. *Reformasi Birokrasi Publik d Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Fakhrurozi, Jafar. 2009. *Buta Aksara dan Kesejahteraan Rakyat*. Semarang.
- Keban, Yermias. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media
- Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pustaka
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2005. *Evaluasi Kinerja SDM*. Bandung : PT. Refika Aditama
- Nasucha, Chaizi. 2004. *Reformasi Administrasi Publik*. Jakarta: Grasindo
- Partono, Dendy. 2013. *Kinerja Operator Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Tanjungpura, Pontianak.

Undang-undang

Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta

Ratminto, Atik Septi Winarsih. 2010. *Manajemen Pelayanan: Pengembangan Modal Konseptual Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar

Satori, Djam'an . 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta

Sinambela, L. Poltak. Dkk. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik-Teori, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara

Soetomo. 2008. *Strategi-stragi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta : Pustaka Belajar

Steers, Richard M. 1985. *Efektifitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Tangkilisan, Hessel Nogi. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: Gramedia

Supriyono, R.A. 1997. *Akuntansi Biaya*. Yogyakarta: BPFE

Tim BPS Kabupaten Landak. 2012. *Landak Dalam Angka 2012*. Ngabang: BPS Kabupaten Landak

Tim BPS Kabupaten Landak. 2013. *Sengah Temila Dalam Angka 2013*. Ngabang: BPS Kabupaten Landak

Tohardi, Ahmad. 2008. *Petunjuk Praktis Menulis Skripsi*. Bandung: Madar Maju

Usmam, Khaerul. 2010. *Perilaku Organisasi*. Bandung: Pustaka Setia

Wibawa, Samodra. 2009. *Administrasi Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Widodo, Joko. 2005. *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*. Sidoarjo: Bayumedia

Yolanda Putri, Grigchella. 2013. *Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Landak*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Tanjungpura, Pontianak.

Peraturan Daerah Kabupaten Landak nomor 16 tahun 2008 tentang Sistem Pendidikan di daerah Landak

Peraturan Bupati Landak nomor 12 tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Landak Landak

Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Pendidikan Non formal



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, Kode Pos 78124
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai civitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : SANTO AGLASIVIESO
NIM / Periode lulus : E42010053 / 2014
Fakultas / Jurusan : ISIP / Ilmu Administrasi
Email address /HP : santoaglas@gmail.com / 085252080629

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**KINERJA DINAS PENDIDIKAN DALAM MEMBERANTAS BUTA AKSARA
DI KECAMATAN SENGAH TEMILA KABUPATEN LANDAK**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

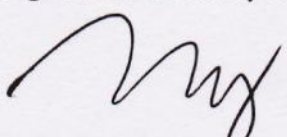
- ☐ fulltext
☐ content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal..... 18/21 Jan 2015


Dr. H. Wijaya Kusuma, MA
NIP. 196202141986031001

Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : 9 Januari 2015


(Santo Aglasivieso)